

Analisis Manfaat Basis Akrual Dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Di Kota Padang)

Fadhilah Sukma

Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, Email: fadhilah.sukma@gmail.com

Vita Fitria Sari

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, Email: vitafitriasari@gmail.com

Abstract

This research aimed to identify the difference in perceptions of public sector manager about the benefits of accrual bases and cash towards accrual bases in local government internal decision-making and identify which bases is more beneficial for local government internal decision-making. This research classified as a comparative study with total of 98 samples of respondents. The classic assumption tests used were test of normality and test of homogeneity. The hypothesis tested in this research by used independent sample t-test. The results of the research showed that: (1) there is a difference in perceptions about the benefits of accrual bases and cash towards accrual bases in local government internal decision-making (2) accrual bases is more beneficial than cash towards accrual bases in local government internal decision-making.

Keywords: *accounting bases, accrual bases, cash towards accruals bases, local government, internal decision making*

1. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi di Indonesia, khususnya sektor publik berjalan sangat lambat. Sampai dengan tahun 2004 Indonesia masih menggunakan sistem pencatatan *single-entry*. Sistem *double-entry* baru diterapkan pada 2005 seiring dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) yaitu UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, dan UU No 15 Tahun 2004 dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.

SAP bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara

menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Amriani (2014) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi menggunakan basis kas menuju akrual. Hal pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas (*financial assets*). Laporan keuangan juga tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya, hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003. Selain itu laporan keuangan berbasis kas menuju akrual juga kurang memberikan rekam jejak atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.

Terbitnya PP 71 Tahun 2010 mengawali periode akrual dalam akuntansi di Indonesia. Perubahan basis akuntansi ini sudah

diisyaratkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 36 yaitu ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Hal yang serupa juga terdapat pada pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan kembali tentang kapan pelaksanaan akrual akan dilaksanakan yaitu selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2008. Meskipun SAP berbasis akrual sudah terbit sejak 2010, penerapan SAP berbasis kas menuju akrual masih dimungkinkan sampai Tahun Anggaran 2014.

Perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual dipelopori oleh negara-negara maju seperti New Zealand dan Australia. Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual pada sektor pemerintahan dipandang sebagai bagian dari konsep *New Public Management* yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler tahun 1993, ini yang dirancang untuk mencapai kondisi operasi yang lebih menyerupai bisnis dan kinerja yang berfokus pada sektor publik. Akuntansi memegang peranan penting sebagai instrumen untuk mendukung sektor publik dalam meningkatkan kinerjanya.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Study Nomor 14 IFAC *Public Sector Committee* (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Namun demikian, banyak pihak yang mengkritik tentang penerapan akuntansi akrual oleh organisasi sektor publik baik secara teoritis maupun praktis. Guthrie berpendapat bahwa akuntansi akrual kurang tepat dan tidak cocok diterapkan dalam konteks sektor publik karena pada sektor publik, laba bukan merupakan tujuan utama dan laba tidak dapat menjadi ukuran yang relevan dari kinerja; struktur keuangan dan solvabilitas tidak relevan di ranah publik; akuntansi akrual tidak mengukur hasil; dan akuntansi akrual kurang relevan dengan kinerja pelayanan, karena akuntansi akrual hanya berfokus pada biaya layanan dan efisiensi (Guthrie, 1998).

Di Indonesia penerapan basis akrual yang merujuk kepada PP No.71 Tahun 2010

baru dilakukan pada tahun 2015. Melihat masih terdapatnya pro dan kontra tentang penerapan basis akuntansi di sektor publik menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Namun, penelitian tentang perbandingan manfaat basis kas menuju akrual dan basis akrual dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas di Indonesia. Penelitian serupa sebenarnya telah dilakukan di beberapa negara lain diantaranya oleh Andriani, et.al (2010) menyatakan dalam penelitiannya di Australia bahwa basis akrual lebih bermanfaat bagi beberapa aktivitas pengambilan keputusan di Pemerintah. Ini didukung oleh penelitian Sousa, et.al (2012) yang melakukan penelitian tentang manfaat informasi akuntansi yang berbasis akrual pada organisasi sektor publik di Brazil. Secara garis besar para pengguna laporan keuangan dan penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual akan lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas. Di Indonesia penelitian sejenis ini baru dilakukan oleh Ferryono dan Sutaryo (2016) yang menunjukkan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dari basis kas.

Drebin et al. (1981) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 10 (sepuluh) kelompok, salah satunya adalah manajemen. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan persepsi manajer sektor publik tentang manfaat basis kas menuju akrual dan basis akrual, dan selanjutnya mengidentifikasi basis mana yang lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah.

2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis

2.1 Teori Institusional

Menurut Nina Eka Wahyuni (2016) Teori institusional sangat erat kaitannya dengan sebuah lingkungan suatu organisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Carruthers (1995) bahwa paham *new institutionalism* menggambarkan tentang struktur dari suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana dia berada. Jadi, jika berbicara mengenai teori institusional, pasti berbicara juga mengenai bagaimana cara suatu organisasi tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari pembentukan struktur organisasi adalah mencapai

kesuksesan dengan diperolehnya suatu pengakuan (legitimasi) atas segala kegiatan organisasi yang telah dikerjakan untuk meningkatkan keluaran (*outcome*) yang efisien.

Bentuk penyesuaian diri dari suatu organisasi tersebut adalah dengan berusaha menjadi mirip dengan organisasi lain yang biasa disebut dengan *isomorphism*. Menurut DiMaggio & Powell (1983), *isomorphism* adalah suatu proses yang memberikan batasan atau memaksa suatu organisasi agar menyerupai dengan organisasi yang lain dalam kondisi lingkungan yang sama. Akan tetapi, terkadang *isomorphism* tersebut akan memberikan tekanan institusional pada organisasi, karena mereka harus melakukan perubahan yang sama (homogenitas) dengan mereka merasa harus kerja keras untuk menjadi sama tersebut (Meyer & Rowan, 1997; Scott, 1995). Terdapat 3 (tiga) macam bentuk *isomorphism*, yakni (1) *Mimetic Isomorphism* adalah peniruan organisasi dengan respon ketidakpastian; (2) *Coercive Isomorphism* menunjukkan adalah organisasi mengambil beberapa cara untuk melakukan adopsi dikarenakan tekanan negara (pengaruh politik), organisasi yang memiliki kekuasaan lebih besar yang hal ini berdampak pada legitimasi; (3) *Normative Isomorphism*, berkaitan dengan norma yang berlaku (DiMaggio & Powell, 1983).

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori institusional yang menggambarkan dalam peraturan mengenai penerapan SAP berbasis akrual ini, telah terlihat secara jelas tentang bagaimana proses *coercive isomorphism* berusaha dengan keras untuk mengetahui bagaimana SAP akrual ini dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Coercive Isomorphism* mengindikasikan bahwa mereka melakukan SAP berbasis akrual ini semata-mata karena sudah adanya perintah dari organisasi di atasnya, yang dalam hal ini pemerintah pusat bahwa mereka harus menjalankan SAP basis akrual ini paling lambat tahun 2015 ini.

Adapun untuk mencapai institusionalisasi ini, mereka akan berusaha untuk menjadi mirip (*isomorphism*) yang ditunjukkan dengan cara *coercive isomorphism* yakni tekanan dari organisasi yang ada di atasnya, yang memiliki kewenangan lebih besar. *Coercive isomorphism* juga merupakan tipe *isomorphism* utama yang terjadi karena

adanya faktor pendorong dalam bentuk desakan dan aturan-aturan hukum yang mengikat organisasi pemerintah tersebut yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

2.2 Basis Akuntansi

a. Basis Kas

Menurut Mardiasmo (2002) Pada penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan dari cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang riil, aktual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan aktivitas tidak dapat diukur dengan baik.

Menurut Tudor dan Mutiu, (2006) kekurangan basis kas tidak ada usaha untuk mencocokkan beban dengan pendapatan yang dihasilkannya, berarti laporan laba rugi dan neraca tidak menggambarkan aktifitas terbaru yang bagus dan kondisi aktivitas yang ada.

b. Basis Kas Menuju Akrual

Menurut Simanjuntak (2005) basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh, dengan cara menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Manfaat basis kas menuju akrual berdasarkan Lampiran II PP 71 Tahun 2010 adalah menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, dan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

c. Basis Akrua

Menurut PP 71 Tahun 2010 basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kemenkeu, 2014).

Menurut Tudor dan Mutiu, (2006), Keuntungan dan kerugian dari basis akuntansi akrual adalah :

Keuntungan, langkah-langkah pendapatan akuntansi akrual saat ini lebih akurat dibandingkan dengan metode cash. Berarti bahwa neraca adalah perkiraan yang lebih akurat dari posisi keuangan (nilai). Akurat, informasi terkini membuatnya lebih mudah untuk memprediksi pendapatan masa depan dan posisi keuangan.

Kekurangan, akuntansi akrual sulit dimengerti, kebingungan karena ada laba bersih tidak sama perubahannya pada periode di kas. Saldo kas sebuah perusahaan dengan pendapatan yang tinggi bahkan dapat menurunkan sepanjang tahun. Karena dalam sejarah akuntansi telah ada periode ketika satu atau yang lain metode didominasi jelas.

Menurut Suhendro, Sylvia, Pigo Alasan laporan keuangan berbasis akrual adalah (PP 71 tahun 2010):

- a. Penyajian informasi keuangan yang lebih informatif, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi terkait;
- b. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan; dan mengikuti *international best practices* dari negara-negara lain dan memenuhi amanat UU bidang keuangan negara

2.3 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik.

Menurut PP 71 tahun 2010 pelaporan keuangan pemerintahan seharusnya

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

2.4 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Drebin et al. (1981) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu :

1. Pembayar pajak (tax payers)
2. Pemberi dana bantuan (grantors)
3. Investor
4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
5. Karyawan atau pegawai
6. Pemasok (vendor)
7. Dewan legislatif
8. Manajemen
9. Pemilih (voters)
10. Badan pengawas (oversight bodies)

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu :

1. Lembaga pemerintah (governing bodies)
2. Investor dan kreditor
3. Pemberi sumber daya (resource providers)
4. Badan pengawas (oversight bodies)
5. Konstituen

Menurut PP 71 tahun 2010 terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman pemerintah

2.5 Perdebatan Penggunaan Basis Akruwal dalam Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah pendapat penelitian-penelitian yang mendukung basis akruwal diterapkan pada sektor publik (Hassan, 2013) yaitu (1) basis akruwal berhasil digunakan di sektor privat, sehingga basis ini masuk akal jika digunakan di sektor publik. (2) Akuntansi akruwal memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas pemerintah. Laporan keuangan dari akuntansi akruwal diyakini lebih komprehensif, sederhana dan mudah dimengerti, sulit untuk dimanipulasi, dan lebih dapat dibandingkan dan konsisten (Athukorala dan Reid, 2003). (3) Pemerintah akan mampu mengukur kegiatannya misalnya dengan memisahkan antara biaya sekarang dan biaya modal (Athukorala dan Reid, 2003). (4) Adopsi pelaporan akruwal akan meningkatkan transparansi, baik transparansi internal maupun eksternal (OECD, 1993). Peningkatan transparansi internal akan mendorong kinerja organisasi, salah satunya melalui pengalokasian sumber daya yang lebih baik. (5) Basis akruwal memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi biaya-biaya dari berbagai kegiatan yang dilakukan, sehingga organisasi dapat lebih efisien, mengalokasikan sumber daya lebih baik dan peningkatan kinerja. (6) basis akruwal mendukung pengelolaan likuiditas yang lebih baik, memberikan dasar untuk menentukan harga produk dan layanan, dan memberikan informasi untuk mengelola sumber daya.

Selain perbedaan sifat seperti yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan pada proses implementasi menyebabkan ada beberapa pihak yang tidak mendukung penggunaan basis akruwal untuk organisasi sektor publik. Hassan (2013) merangkum pendapat dari penelitian yang tidak mendukung penggunaan basis akruwal yaitu (1) perubahan akuntansi akruwal selalu terhubung dengan reformasi sektor publik lainnya

sehingga harus dilihat sebagai bagian dari reformasi. (2) Implementasi basis akruwal sulit dan mahal. Pelaksanaan akuntansi akruwal membutuhkan sistem akuntansi dan teknologi yang rumit.

Selain itu, kadang-kadang pemerintah kekurangan personil akuntansi berkualitas yang dapat mengelola sistem. (3) Berbeda dengan klaim *New Public Management* (NPM), dengan menerapkan akuntansi akruwal, peran manajerial dan politik dalam lingkungan pemerintahan menjadi kurang jelas. (4) Pelaksanaan akuntansi akruwal di sejumlah sektor publik menghasilkan laporan keuangan yang justru membingungkan para penggunanya. (5) Basis akruwal, seperti basis akuntansi lain, masih rentan untuk dimanipulasi (Newberry, 2002). Argumen ini juga tidak menyetujui klaim bahwa basis akruwal menawarkan transparansi yang lebih besar. (6) Beberapa bukti penelitian yang menunjukkan bahwa biaya penerapan akuntansi berbasis akruwal dan pelaporannya mungkin memiliki biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diterima (Jones dan Puglisi, 1997).

2.6 Hubungan Basis Akuntansi dengan Pengambilan Keputusan Internal

Mardiasmo (2002) pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan bukan merupakan satu – satunya sumber informasi untuk pembuatan keputusan, akan tetapi laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Laporan keuangan

merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai.

Menurut Salvatore dan Gesso (2013) akuntansi akrual memberikan informasi lengkap tentang aset organisasi publik dan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Selain itu, model akuntansi akrual memberikan informasi tentang hasil yang diperoleh (pendapatan dan biaya), yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, untuk lebih mengevaluasi kinerja dan untuk mengukur dampak dari kebijakan publik. Dengan demikian, model ini memungkinkan manajemen untuk membuat pilihan yang lebih rasional dan efisien.

2.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi mengenai Persepsi Manfaat Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah, yaitu :

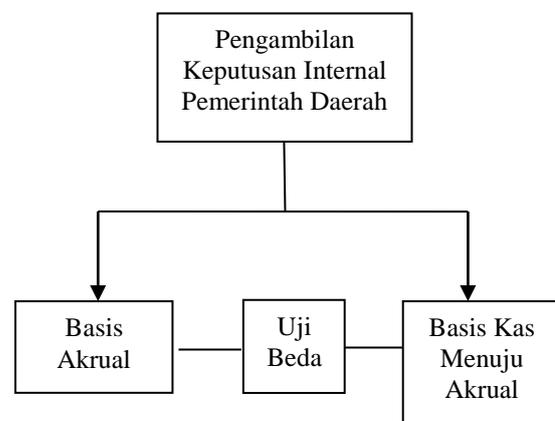
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan Andriani, et.al (2010) menyatakan dalam penelitiannya di Australia bahwa basis akrual lebih bermanfaat bagi beberapa aktivitas pengambilan keputusan di Pemerintah. Hasil penelitian Sousa, et.al (2012) yang melakukan penelitian tentang manfaat informasi akuntansi yang berbasis akrual pada organisasi sektor publik di Brazil. Secara garis besar para pengguna laporan keuangan dan penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual akan lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nirmala, et.al (2014) menjelaskan bahwa informasi yang dihasilkan basis akrual lebih tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah. (Guthrie, 1998), berpendapat bahwa akuntansi akrual kurang tepat dan tidak

cocok diterapkan dalam konteks sektor publik karena pada sektor publik, laba bukan merupakan tujuan utama dan laba tidak dapat menjadi ukuran yang relevan dari kinerja; struktur keuangan dan solvabilitas tidak relevan di ranah publik; akuntansi akrual tidak mengukur hasil; dan akuntansi akrual kurang relevan dengan kinerja pelayanan, karena akuntansi akrual hanya berfokus pada biaya layanan dan efisiensi.

2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan hubungan antar variabel di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan didukung oleh teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan persepsi manajer sektor publik tentang manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau lebih dari satu (Sugiyono, 2004 :11).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesbangpol Pemerintah Kota Padang jumlah satuan kerja yang terdapat

berjumlah 52 OPD yang terdiri dari, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat.

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Total Sampling*. Jumlah OPD di Kota Padang berjumlah 52 OPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat. Sampel dari penelitian ini adalah mencakup pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada OPD yaitu Kepala OPD dan tiga orang kepala bidang di masing-masing OPD, kriteria Kepala dinas dan Kepala Subbagian adalah menjabat \geq 3 Tahun.

Responden dalam penelitian ini yaitu level manajer, dikarenakan level manajer merupakan bagian/pegawai yang bertanggungjawab terhadap proses pengambilan keputusan dan terlibat langsung serta memahami kegiatan pada masing-masing bagian di OPD, dimana terdiri atas Kepala Dinas dan Kepala subbagian pada OPD. Jumlah responden untuk setiap OPD yang dijadikan sampel 4 (empat) orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuisisioner dari subjek penelitian pada instansi pemerintah daerah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara lansung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuisisioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket (kuisisioner).

3.4 Instrumen Penelitian dan Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan kuisisioner yang dirujuk dari artikel Andriani et,al (2010) untuk membantu penelitian ini menggunakan skala likert 1- 5

3.5 Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidak sahnya (tidak valid) suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut,(Ghozali, 2006:49). Untuk melihat validitas dari data, dilihat dari *Corrected item–Total Correlation*, apabila melebihi nilai r hitung melebihi nilai r tabel maka data dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*.

Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (Imam, 2005).

- a) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliabel”.
- b) Jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliabel”.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas.

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Scatterplot test*. Penentuan kenormalan data, dilakukan dengan cara melihat grafik plot dimana terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat di simpulkan bahwa memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas yaitu untuk dapat melihat bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas dilakukan hanya dengan memilih salah satu statistik kemudian di interpretasikan, yaitu statistik yang didasarkan pada rata-rata (*Based on Mean*).

Jika nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$ maka pada varian tidak terdapat Homogenitas. Jika nilai $\text{sig} > \alpha 0,05$ maka pada varian terdapat Homogenitas.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini bertujuan menggambarkan masing-masing variabel dalam bentuk hasil distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisis mean, standar deviasi, tingkat capaian responden dan koefisien serta memberikan interpretasi analisis tersebut.

Menghitung nilai jawaban;

- Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.
- Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan

$$\text{Rumus: } \frac{5SB + 4S + 3KB + 2TB + 1STB}{15}$$

- Menghitung nilai rerata jawaban responden, dengan rumus:

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{i=1}^n xi}{n}$$

- Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel. Dengan rumus:

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria UNP sebagai berikut:

- Interval jawaban responden 81-100% kategori jawabannya sangat baik
- Interval jawaban responden 66-80% kategori jawabannya baik
- Interval jawaban responden 56-65% kategori jawabannya cukup baik
- Interval jawaban responden 41-55% kategori jawabannya kurang baik
- Interval jawaban responden < 40% kategori jawabannya tidak baik

2. Uji Hipotesis (*t-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai

signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test* dengan rumus :

$$t - \text{Test} = \frac{\beta n}{S\beta n}$$

Dengan kriteria pengujian :

- Jika $\text{sign} < 0,05$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ nilai $\beta +$, maka hipotesis diterima.
- Jika $\text{sign} < 0,05$, $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ nilai $\beta -$, maka hipotesis ditolak.
- Jika $\text{sign} > 0,05$, $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis ditolak.

4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Padang yang berjumlah 52 OPD. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total Sampling*) dengan Jumlah responden OPD di kota Padang sebanyak 208 orang yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan inspektorat. Sampel dari penelitian ini adalah mencakup pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada OPD yaitu Kepala OPD dan tiga orang kepala bidang di masing-masing OPD, kriteria Kepala dinas dan Kepala Subbagian adalah menjabat ≥ 3 .

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 208 kuesioner, yang kembali sebanyak 181 kuesioner. Dan kuesioner yang diisi lengkap yang dapat diolah sebanyak 98 kuesioner atau sebesar 87,01%.

4.2 Demografi Responden

4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebagian besar responden merupakan Perempuan dengan persentase 59,18% atau sebanyak 58 orang, selanjutnya diikuti oleh laki-laki dengan Persentase 40,82% atau sebanyak 40 orang.

4.2.2 Berdasarkan Umur

Sebagian besar responden yang berusia 56-60 tahun dengan persentase 3,06% atau sebanyak 3 orang, selanjutnya diikuti oleh responden yang berusia 51 - 55 tahun dengan Persentase 15,31% atau sebanyak 15 orang, selanjutnya yang berusia 46 - 50 tahun dengan persentase 22,45% atau sebanyak 22 orang, selanjutnya yang berusia 41 - 45 tahun sebanyak persentase 22,45% atau sebanyak 22

orang, selanjutnya yang berusia 36 – 40 tahun sebanyak persentase 14,48% atau sebanyak 14 orang, selanjutnya yang berusia 31 – 35 tahun sebanyak persentase 17,35% atau sebanyak 17 orang, kemudian yang berusia 25 - 30 tahun sebanyak persentase 5,10% atau sebanyak 5 orang.

4.2.3 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan responden terbanyak adalah Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 59 orang atau sebesar 60,21%. Selanjutnya pada tingkat kedua adalah Magister (S2) yaitu sebanyak 24 orang atau sebesar 24,49%, pada tingkat ketiga yaitu D3 sebanyak 9 orang atau 9.18%, dan yang terakhir yaitu SMA sebanyak 6 orang atau sebesar 6,12%.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuisioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hit} > r_{tabel}$, maka dikatakan valid. r_{tabel} untuk $n=98$ adalah 0,1966.

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen yaitu lebih dari 0,1966. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Hasil menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuisioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data Basis Akrua dan Basis Kas Menuju Akrua bahwa hasil uji normalitas memenuhi asumsi normal karena pada terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Homogenitas

Hasil uji homogenitas bahwa nilai signifikansi (Sig) dari data Basis Akrua dan

Basis Kas Menuju Akrua sebesar 0.645 dapat disimpulkan bahwa Basis Akrua dan Basis Kas Menuju Akrua dikatakan homogen karena $sig > 0,05$

4.5 Uji Hipotesis

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian diketahui nilai Sig < Alpha sebesar 0.00. Hipotesis dapat diterima jika nilai Sig lebih kecil dibandingkan alpha 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi manajer sektor public tentang manfaat basis akrua dan basis kas menuju akrua dalam pengambilan keputusan Internal Pemerintah Daerah.

Tabel 1 disini

Hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan perbandingan manfaat basis akrua dan basis kas menuju akrua berdasarkan kuesioner yang disebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang Padang. Jawaban dari responden telah dikelompokkan menjadi dua, yaitu tidak bermanfaat dan bermanfaat. Tidak bermanfaat merepresentasikan jawaban responden yang memilih opsi tidak bermanfaat dan kurang bermanfaat. Bermanfaat merepresentasikan jawaban responden yang memilih opsi bermanfaat dan sangat bermanfaat.

Pernyataan (poin 1) Menanyakan basis yang mana lebih bermanfaat dalam menilai kinerja OPD, responden menjawab basis akrua lebih bermanfaat dibandingkan dengan basis kas menuju akrua untuk menilai kinerja OPD dengan nilai rata-rata. Jawaban responden untuk basis akrua 4,73 sedangkan untuk basis kas menuju akrua 3,93 dan untuk pernyataan (poin 2) tentang menilai kinerja program-program yang ada di OPD, responden menjawab basis akrua lebih bermanfaat dibandingkan dengan basis kas menuju akrua dalam menilai kinerja program di OPD dengan nilai rata-rata jawaban responden untuk basis akrua 4,66 sedangkan untuk basis kas menuju akrua 3,94. Selanjutnya pernyataan (poin 3) yaitu menilai kinerja pejabat struktural di OPD, responden juga menjawab basis akrua lebih bermanfaat dibandingkan dengan basis kas menuju akrua untuk menilai kinerja pejabat struktural di OPD dengan nilai rata-rata jawaban responden untuk basis akrua 4,42 sedangkan untuk basis kas menuju akrua 3,78. Hal ini sesuai dengan PSAP 12 yang

menjelaskan manfaat LO adalah menyediakan mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).

Pernyataan (poin 4) untuk menilai efektivitas OPD dalam memberikan pelayanan publik, hasil jawaban responden yang disebar bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam menilai efektifitas OPD, dapat dilihat nilai rata-rata jawaban responden pada tabel diatas untuk basis akrual 4,48 sedangkan untuk basis kas menuju akrual 3,71 dan, pernyataan (poin 5) basis mana yang lebih bermanfaat untuk menilai efisiensi OPD dalam memberikan layanan publik, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam memberikan layanan publik dibandingkan dengan basis kas menuju akrual, dengan nilai rata-rata jawaban responden untuk basis akrual 4,51 dan basis kas menuju akrual 3,70. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012). Dua penelitian terdahulu sama-sama menjelaskan bahwa dalam hal memperkirakan arus kas instansi, basis kas akan lebih bermanfaat daripada basis akrual.

Pernyataan (poin 6) menanyakan manakah basis yang bermanfaat bagi responden dalam membantu memastikan akuntabilitas OPD, hasil jawaban responden menjelaskan bahwa basis akrual lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk memastikan akuntabilitas dalam peranan pelaporan keuangan pada kerangka konseptual daripada basis kas menuju akrual dengan persentase rata-rata basis akrual 4,62, basis kas menuju akrual 3,80 selanjutnya (poin 7) membantu memastikan pemenuhan pelaksanaan akuntabilitas OPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam pemenuhan pelaksanaan akuntabilitas dalam peranan pelaporan keuangan pada kerangka konseptual dibandingkan basis kas menuju akrual, responden menjawab dengan nilai rata-rata basis akrual 4,46 dan nilai basis kas menuju akrual 3,73. Pada suatu periode pelaporan setiap entitas memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

testruktur. Hal ini konsisten dengan penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).

Pernyataan (poin 8) basis manakah yang lebih bermanfaat antara basis akrual dan basis kas menuju akrual untuk memprediksi arus kas OPD dimasa yang akan datang, hasil jawaban responden menunjukkan bahwa basis akrual lebih bermanfaat memprediksi arus kas dimasa yang akan datang daripada basis kas menuju akrual dengan hasil rata-rata basis akrual 4,38, basis kas menuju akrual 3,81 dan pernyataan (poin 9) untuk menilai kemampuan OPD dalam menghasilkan arus kas, jawaban dari responden bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam menilai kemampuan menghasilkan arus kas dengan nilai rata-rata basis akrual 4,43 sedangkan basis kas menuju akrual 3,74. Selanjutnya pernyataan (poin 10) bagaimana responden menilai basis mana yang bermanfaat sebagai masukan bagi OPD dalam mempersiapkan anggaran, jawaban responden adalah basis akrual lebih bermanfaat dalam penyiapan anggaran OPD, dengan nilai rata-rata basis akrual 4,51 dan basis kas menuju akrual 3,76. Sedangkan dua penelitian sebelum ini mengatakan bahwa basis kas yang lebih menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk pertanyaan ini. Standar akuntansi LAK diatur pada PSAP 03.

Pernyataan (poin 11) menanyakan basis mana yang bermanfaat sebagai masukan dalam membuat keputusan investasi dalam jumlah besar, hasil responden menjelaskan bahwa basis akrual lebih bermanfaat daripada basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan investasi pemerintah daerah, dengan nilai rata-rata basis akrual 4,33 dan basis kas menuju akrual sebesar 3,57. Jawaban responden tersebut sejalan dengan PSAP 01 paragraf 10, yang menyatakan Laporan Keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pertanyaan selanjutnya (poin 12) bagaimana responden menilai basis yang lebih bermanfaat sebagai masukan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang dimiliki, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang dimiliki

dibandingkan dengan basis kas menuju akrual, hasil jawaban responden berdasarkan nilai rata-rata basis akrual sebesar 4,33 dan basis kas menuju akrual 3,61, dan pernyataan (poin 13) basis mana yang bermanfaat dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya, hasil responden menjelaskan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya daripada basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata basis akrual 4,48 dan basis kas menuju akrual 3,61. Selanjutnya pernyataan (poin 14) untuk menilai kebutuhan sumber daya OPD dimasa datang, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam menilai kebutuhan sumber daya OPD dimasa datang dibandingkan basis kas menuju akrual dengan hasil rata-rata basis akrual 4,46 dan basis kas menuju akrual 3,66

Pernyataan (poin 15) untuk menilai basis mana yang lebih bermanfaat dalam penggunaan sumber daya telah sesuai dengan tujuan OPD, jawaban pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam evaluasi kesesuaian penggunaan sumber daya dengan tujuan OPD daripada basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata 4,44 dan basis kas menuju akrual 3,64. Responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam pertimbangan keempat situasi di atas, hasil ini konsisten dengan penelitian dari Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012) yang menyatakan bahwa basis akrual lebih bermanfaat untuk pertimbangan tentang sumber daya OPD.

Pernyataan (poin 16) untuk mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik basis manakah yang lebih bermanfaat diperlukan, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat untuk mengidentifikasi biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik dibandingkan dengan basis kas menuju akrual, dengan jumlah nilai rata-rata basis akrual 4,44 dan basis kas menuju akrual 3,64 dan pernyataan (poin 17) untuk melihat basis mana yang bermanfaat dalam menilai kemampuan OPD untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan OPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat daripada basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata basis akrual 4,23 dan basis kas menuju akrual 3,61. Jawaban ini

konsisten dengan hasil penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).

Pernyataan (poin 18) sebagai pengukur ketercapaian tujuan dan sasaran OPD, responden menjawab basis akrual lebih bermanfaat dalam mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran OPD daripada basis kas menuju akrual dengan jumlah rata-rata basis akrual 4,40 dan basis kas menuju akrual 3,79 selanjutnya (poin 19) untuk menilai basis mana yang bermanfaat dalam kelayakan tujuan dan sasaran OPD, jawaban responden bahwa basis akrual lebih bermanfaat dalam menilai kelayakan tujuan dan sasaran OPD dibandingkan basis kas menuju akrual dengan nilai rata-rata basis akrual 4,44 dan basis kas menuju akrual 3,80. Maka hal tersebut konsisten dengan jawaban responden (poin 18 dan 19) tentang bagaimana standar akuntansi dapat menjelaskan kelayakan dan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh OPD. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Andriani, et.al (2010) dan penelitian Sousa, et.al (2012).

Jika dilihat dari pemaparan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dari seluruh pertanyaan yang diajukan ke responden basis akrual dirasakan lebih dapat memberikan manfaat dari pada basis kas menuju akrual.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan pengujian tersebut, diketahui nilai Sig < Alpha sebesar 0.00. Hipotesis dapat diterima jika nilai Sig lebih kecil dibandingkan alpha 0.05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Basis Akrual dan Basis Kas Menuju Akrual terdapat perbedaan dalam pengambilan keputusan Internal Pemerintah Daerah, Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nirmala, et.al (2014) menyebutkan bahwa perubahan basis akuntansi sektor publik dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual disebabkan oleh kelemahan basis kas dalam menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. Nirmala, et.al (2014) juga menjelaskan bahwa informasi yang dihasilkan basis akrual lebih tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban dan dapat menghasilkan informasi

keuangan yang komprehensif tentang pemerintah.

Andriani, et.al (2010) menyatakan dalam penelitiannya di Australia bahwa basis akrual lebih bermanfaat bagi beberapa aktivitas pengambilan keputusan di Pemerintah. Hasil penelitian Andriani, et.al (2010) dikuatkan lagi oleh penelitian Sousa, et.al (2012) yang melakukan penelitian secara garis besar para pengguna laporan keuangan dan penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual akan lebih memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas.

Tujuan dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan publik maupun meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi pemerintah daerah (Lipsky, 1983). Hal tersebut dapat terjadi karena perbaikan sistem akuntansi akan menghasilkan informasi kinerja keuangan yang lebih berkualitas serta meningkatkan kualitas distribusi atas informasi tersebut. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Hou et al., 2003). Penerapan akuntansi berbasis akrual juga dapat memberikan manfaat lain berupa transparansi keuangan, mempermudah identifikasi biaya layanan, serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan basis akuntansi *cash toward accrual*. Manfaat bagi pemerintah daerah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya pemerintah daerah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan basis akrual, maka pemerintah daerah dapat menghasilkan keputusan internal yang tepat karena pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih baik dan komprehensif terkait dengan sumber daya ekonominya.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Terdapat perbedaan basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah kota Padang.
2. Basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah kota Padang

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berikut adalah keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menggunakan teknik wawancara agar dapat mengeksplorasi data dengan baik dan memperoleh data secara spesifik.
2. Perlu melakukan koordinasi antara OPD-OPD (BKD, Inspektorat) terkait dalam proses penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini, agar memiliki masukan-masukan dari berbagai pihak. Sehingga dapat dilakukan kajian-kajian secara mendalam tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup. Untuk selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan kuesioner terbuka agar tidak terjadinya bias dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

Daftar Pustaka

- Amriani, Tenry Nur. 2014. Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrua>.
- Andriani,dkk. 2010. Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: PublicSector Managers' Perceptions. *Review No. 53 Vol. 20*

- Athukorala, S. L., & Reid, B. (2003), *Accrual budgeting and accounting in government and its relevance for developing member countries*. Manila: Asian Development Bank
- BPK-RI, 2015, *Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Tiga Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat*, <http://padang.bpk.go.id/?p=5141> diakses 20/4/2017
- Carlin, T. M., 2005, *Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector*, *Financial Accountability & Management*, Vol. 21 No. 3.
- Deloitte Public Sector Paper, 2004. *Mastering the Transformation: New Public Management, Accrual Accounting, and Budgeting*
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan : Salemba Empat
- Ferryono dan Sutaryo. 2016. *Manfaat Basis Akrua dan Basis Kas Menuju Akrua dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah*. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*
- International Federation of Accountants (IFAC), 2003. *Study 14, Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)*.
- _____, 1994. *Occasional Paper 1, Implementing Accrual Accounting in Government: The New Zealand Experience*.
- _____, 2014. *IFAC handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements Vol. 1. IFAC Publications*.
- Kementrian Keuangan, 2014. *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrua*. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrua>. diakses tanggal 17 Maret 2017
- Khan, A., Mayes, S., 2009. *Transition To Accrual Accounting*. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.
- Khubiati Ani dan Johan Arifin. 2016. *Analisis Pengaruh Faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah*. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*
- Laughlin, R. (2012). *Debate: Accrual Accounting: Information For Accountability Or Decision Usefulness? Public Money & Management*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- OECD, 1993. *Accounting for what? The value of Accrual Accounting in the Public Sector*, *Occasional Papers on Public Management*.
- _____, 2010. *Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP*.
- Putra, I Wayan G. Y. D., dan Ariyanto D., 2015, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAP Berbasis Akrua*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 14-32 ISSN: 2302-8556*
- PP 71 tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Sousa, R. G., Vasconcelos, A. F., Caneca., R. L., Niyama, J. K., 2012, *Accrual Basis Accounting in the Brazilian Public Sector: Empirical Research on the Usefulness of Accounting Information*. *Paper presented at the 12th USP Congress of Controllship and Accounting, São Paulo, July 2012*.

- Sri Rahayu. 2005. *SPSS Versi 12.00 dalam Riset Pemasaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro,dkk. Resistensi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Suwardjono, 2013. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan.BPFE Yogyakarta.
- Thomas H. Beechy, 2007. Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability? The Innovation
- Journal: *The Public Sector Innovation Journal*, Volume 12(3), 2007, article 4.
- Tudor, A., T., & Mutiu, A., 2006.Cash Versus Accrual Accounting In Public Sector. Faculty of Economics and Business Administration, Babes Bolyai University, <http://www.ssrn.com>.
- Wahyuni Nina Eka dan Helmy Adam. 2016. Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Perspektif Teori Institutional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*

LAMPIRAN

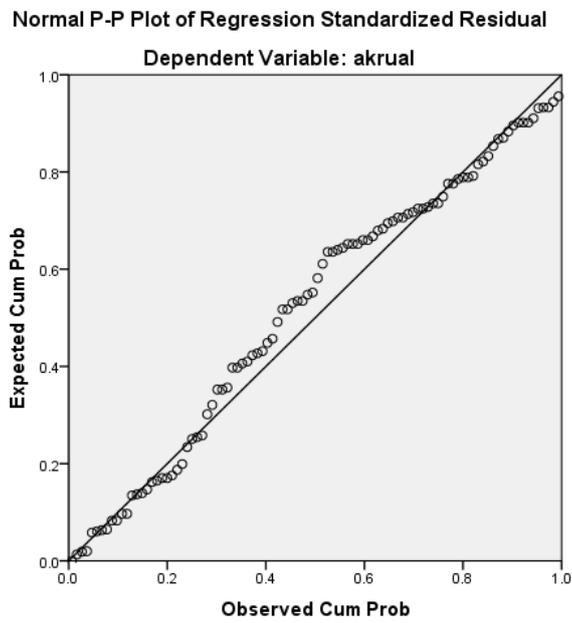
Tabel 1
Manfaat basis akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan internal

OPD di Kota Padang

No	Basis AkruaI							Basis Kas Menuju AkruaI						
	N	Tb (%)	N	b(%)	Mean	SD	Med	N	Tb (%)	N	b(%)	Mean	SD	Med
1	1	1,02	97	98,98	4,73	,466	5,00	25	25,51	73	74,49	3,93	,853	4,00
2	0	0,00	98	100,00	4,66	,475	5,00	21	21,43	77	78,57	3,94	,784	4,00
3	9	9,18	89	90,82	4,42	,475	5,00	32	32,65	66	67,35	3,78	,914	4,00
4	4	4,08	94	95,92	4,48	,646	5,00	28	28,57	70	71,43	3,71	,786	4,00
5	5	5,10	93	94,90	4,51	,662	5,00	35	35,71	63	64,29	3,70	,864	4,00
6	1	1,02	97	98,98	4,62	,508	5,00	30	30,61	68	69,39	3,80	,837	4,00
7	2	2,04	96	97,96	4,46	,540	4,00	36	36,73	62	63,27	3,73	,832	4,00
8	2	2,04	96	97,96	4,38	,547	4,00	32	32,65	66	67,35	3,81	,795	4,00
9	1	1,02	97	98,98	4,43	,518	4,00	34	34,69	64	65,31	3,74	,816	4,00
10	1	1,02	97	98,98	4,51	,523	5,00	32	32,65	66	67,35	3,76	,800	4,00
11	6	6,12	92	93,88	4,33	,639	4,00	40	40,82	58	59,18	3,57	,732	4,00
12	6	6,12	92	93,88	4,33	,622	4,00	36	36,73	62	63,27	3,61	,782	4,00
13	9	9,18	89	90,82	4,48	,692	5,00	35	35,71	63	64,29	3,66	,745	4,00
14	5	5,10	93	94,90	4,46	,676	5,00	36	36,73	62	63,27	3,66	,786	4,00
15	6	6,12	92	93,88	4,44	,643	5,00	34	34,69	64	65,31	3,64	,815	4,00
16	1	1,02	97	98,98	4,47	,560	4,00	38	38,78	60	61,22	3,64	,815	4,00
17	6	6,12	92	93,88	4,23	,639	4,00	42	42,86	56	57,14	3,61	,755	4,00
18	4	4,08	94	95,92	4,40	,570	4,00	31	31,63	67	68,37	3,79	,736	4,00
19	4	4,08	94	95,92	4,44	,576	4,00	29	29,59	69	70,41	3,80	,824	4,00

Independent Samples Test

Uji Scatterplot



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Test of Homogeneity of Variances

ANOVA

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1723.345	42	41.032	.894	.645
Within Groups	2525.717	55	45.922		
Total	4249.061	97			

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	32.083	.000	9.736	194	.000	13.888	1.426	11.075	16.701
Equal variances not assumed			9.736	147.609	.000	13.888	1.426	11.069	16.707

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Halaman ini sengaja dikosongkan